

Judul : Indeks Korupsi Indonesia Pemerintah Didesak Serius Berantas Korupsi
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

INDEKS KORUPSI INDONESIA

Pemerintah Didesak Serius Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — DPR dan kalangan akademisi memandangkan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merupakan alarm bagi pemerintah. Penurunan itu mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan masih maraknya praktik korupsi, terutama di sektor perizinan.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025, seperti dilaporkan Transparency International Indonesia (TII) turun tiga poin dari 37 poin di 2024 menjadi 34 poin di 2025. IPK menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Peringkat Indonesia di antara 180 negara yang dinilai pun merosot, dari semula di peringkat ke-99 menjadi ke-109.

Penurunan paling signifikan untuk IPK Indonesia pada indikator IMD World Competitiveness Yearbook atau indeks yang mengukur daya saing negara dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis, kemakmuran ekonomi, dan kesejahteraan jangka panjang. Skor Indonesia turun dari poin 45 ke 26.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut dia, penurunan skor dan peringkat IPK menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi di Indonesia masih buruk.

"Laporan yang disampaikan TII ini tak bisa dianggap angin lalu. Skor 34 dan turunnya peringkat Indonesia jadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi kita masih sangat buruk," ujar Hasbi, lewat keterangan tertulis yang diterima *Kompas* di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan. Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama penegak hukum lainnya perlu segera menyusun peta jalan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya penindakan, tetapi juga pencegahan secara sistematis," tegasnya.

Penegakan hukum lemah

Peneliti Pusat Kajian Anti-

korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai, penurunan skor IPK Indonesia mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan tingginya biaya ekonomi akibat praktik korupsi.

Zaenur menyoroti penurunan skor IPK yang terjadi di tengah tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai sekitar 79 persen. Menurut dia, kontras tersebut menunjukkan persepsi publik dan komunitas global terhadap korupsi tak sejalan dengan sentimen politik di dalam negeri.

Zaenur menjelaskan, penurunan skor IPK tahun ini banyak dipengaruhi merusotnya indikator daya saing (*competitiveness*). Namun, menurut dia, faktor yang menyebabkan skor IPK Indonesia rendah secara struktural adalah kualitas penegakan hukum.

"Dua skor terendah itu sektor hukum, yang mencerminkan korupsi di institusi penegak hukum dan ketidakpastian hukum, termasuk dalam perkara perdata," katanya.

Zaenur menilai rendahnya daya saing ekonomi berkaitan erat dengan ekonomi biaya tinggi akibat pungutan liar, pe-

merasan, dan praktik suap terhadap pelaku usaha. Kondisi tersebut juga tercermin dalam indikator PERC Asia Risk Guide yang menilai tingkat korupsi di kawasan Asia Pasifik.

"Kalau Indonesia serius mau memberantas korupsi untuk menyejahterakan rakyat dan memperbaiki iklim bisnis, suap, pemerasan, dan gratifikasi harus diberantas," ujarnya.

Pemerasan di Kemenaker

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, dalam sidang perkara pemerasan terkait rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan, Bupati Buol (Sulawesi Tengah) Risharyudi Triwibowo mengaku mendapatkan pinjaman uang 10.000 dolar AS serta tiket konser Black Pink.

Risharyudi menyampaikan pengakuan itu saat dihadirkan sebagai saksi. Ia mengaku, uang dan tiket itu dia peroleh dari salah satu terdakwa perkara itu, yakni Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025 Haryanto Risharyudi menerima pemberian itu jelang Pemilu 2024 saat ia masih menjabat sebagai asisten Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. (BOW/RTG)